



Pengaruh kualitas aparatur daerah dan sistem informasi terhadap manajemen aset di Kabupaten Oku Selatan

Septriyani¹, Kartika Rachma Sari², M. Husni Mubarak³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

¹septriyani022000@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15 Juni 2022

Disetujui :

20 Juni 2022

Dipublikasikan :

25 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas aparatur daerah, dan sistem informasi terhadap manajemen aset di pemerintahan kabupaten oku selatan provinsi sumatera selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna barang, pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang pengguna yang ada pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari penyebaran kuisioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Aset dan (2) Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Aset. Dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset.

Kata kunci: Kualitas aparatur daerah, Sistem informasi, Manajemen aset, Pemerintahan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the quality of local apparatus, and information systems on Asset Management in the South Oku district government, South Sumatra province. The population in this study are goods users, user goods administrators and assistant user goods managers in each regional device organization. The data used in this study is primary data obtained from distributing questionnaires to respondents. This study uses multiple linear regression analysis model with the help of SPSS software. The results showed that: (1) the quality of the regional apparatus and information systems partially positive and significant effect on asset management and (2) the quality of the regional apparatus and information systems simultaneously had a positive and significant effect on asset management. It can be concluded that the quality of regional apparatus and information systems has an impact on asset management.

Keywords: Regional apparatus quality, Information system, Asset management, Government



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Berlakunya secara efektif Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah memberikan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi, mengelola dan mengembangkan kemampuan daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpindahan arah kebijakan dari sentralisasi jadi desentralisasi ini dikenal dengan otonomi daerah. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hal, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia pada dasarnya memiliki jumlah aset yang sangat besar. Tetapi selama ini kebanyakan masyarakat hanya mengenal aset negara sebatas sumber daya alam yang meliputi kekayaan dan potensi yang ada di bumi, air dan udara (Prihatini et al., 2020). Padahal banyak sekali aset negara

Indonesia tidak hanya itu saja, banyak aset negara yang perlu dikelola dengan baik apalagi terkait pengelolaan keuangan negara.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dimana dijelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut pengaturannya tentang barang milik daerah selanjutnya ditetapkan dalam PP No. 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah dengan pedoman teknis berupa Peraturan Mendagri No. 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Regulasi – regulasi di atas menunjukkan bahwa posisi aset pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Dalam Peraturan Mendagri No. 19 tahun 2016 pasal 1 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli ataupun diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Maka pemerintah daerah dituntut harus lebih efektif dan efisien dalam mengelola manajemen aset daerah. Untuk meningkatkan dukungan pengelolaan aset daerah secara efisien, efektif dan menguntungkan diperlukan adanya sinergisitas serta menciptakan transparansi kebijakan manajemen/pengelolaan aset daerah sehingga pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengawasan sebagai alat untuk mengawasi jalannya manajemen aset Pemerintah Daerah (Azhar & Darwanis, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat daerah dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antoh (2017), menyatakan bahwa inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset terbukti berpengaruh signifikan/positif terhadap optimalisasi aset tetap. Menurut Azhar (2017), sebesar 93.5% manajemen aset dipengaruhi oleh sistem informasi. Menurut Jeffry et al., (2021), pemahaman regulasi, sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap manajemen aset. Pada penelitian lain, aparatur daerah, regulasi, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset (Yusnidar et al., 2021). Pada penelitian Yuliana et al., (2021), kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi, sistem pengendalian intern, dan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap efektivitas manajemen aset tetap.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Sehingga Kabupaten Oku Selatan diresmikan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muara Dua, yang merupakan ibu kota dari kabupaten OKU Selatan.

Kabupaten Oku Selatan, berdasarkan opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2014 –2020 yang dapat di lihat pada Tabel 1. Pencapaian ini untuk dalam lingkup kota/kabupaten merupakan hal yang sulit untuk dicapai oleh pemerintahan. Namun, Kabupaten Oku Selatan mampu mendapatkan opini yang baik atas laporan tersebut. sumateranews.co.id. Kabupaten Oku Selatan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tersebut dikarenakan laporan keuangannya sudah tersusun rapi dari awal perencanaan serta pertanggung jawaban atas pengungkapan.

Tabel 1. Daftar Opini BPK

No	Keterangan	Opini
1.	2014	WTP
2.	2015	WTP
3.	2016	WTP
4.	2017	WTP
5.	2018	WTP
6.	2019	WTP
7.	2020	WTP

Sumber : www.bpk.go.id/ihrs.

Salah satu faktor yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Oku Selatan dapat memperoleh dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ialah juga dapat dilihat dari pengelolaan barang milik daerahnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca pemerintah daerah”. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan hal yang sangat penting karena pengelolaan barang milik daerah yang buruk dapat berdampak buruk pula bagi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Arlini & Darwanis, 2014). Berdasarkan dari opini yang diberikan oleh BPK, hal ini mengartikan bahwa pemerintah Kabupaten Oku Selatan dalam pelaksanaan manajemen aset sudah bisa dikatakan baik dan cukup maksimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa pengguna barang atau aset daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur daerah sangat berperan penting dalam menciptakan manajemen aset yang efektif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur daerah harus berpedoman pada peraturan perundang - undangan (regulasi) (Kariem, 2020). Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan barang milik daerah (Kurniyanta et al., 2018). Sesuai dengan pernyataan tersebut maka aparatur daerah dituntut agar memiliki pemahaman, berkualitas dan ahli dalam sistem pengelolaan barang milik daerah. Kualitas aparatur daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada pengelolaan aset, memiliki kemampuan fisik serta intelektual sangat penting agar dalam pelaksanaan pengelolaan barang dilakukan dengan optimal (Afandi, 2012). Pernyataan ini sejalan dengan kajian yang ditemukan Rosihan et al., (2017) hasil Penelitian membuktikan bahwa kaulitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua).

Faktor lain yang juga relatif mempunyai kontribusi terhadap pengaruh manajemen aset adalah Sistem Informasi. Sistem Informasi dalam hal untuk mempermudah segala urusan pengelolaan barang milik daerah juga sangat diperlukan (Dewi et al., 2018). Harjono Padmono Putro (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tata kelola sistem informasi memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan organisasi terhadap kebijakan. Peraturan Pemerintah No. 56/2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan agar mempergunakan sistem informasi di daerahnya. Sistem informasi manajemen barang diharapkan memberi kemudahan dalam hal pendataan dan pelaporan barang daerah secara tepat dan akurat. Sesuai dengan Permendagri No. 17/2007 pasal (30) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, sebagai alat bantu pendataan barang milik daerah. Pengurus dan operator SIMDA BMD harus menguasai pengoperasian aplikasi SIMDA BMD dan memahami prosedur mengenai pengelolaan barang milik daerah. Sehingga pendataan barang akan tertata dan tersajikan dengan tepat dan akurat. Pernyataan ini sejalan dengan kajian yang ditemukan Mainar dan Abdullah (2017) hasil Penelitian membuktikan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset (Studi pada SKPK di kabupaten Aceh Jaya).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer, yakni data yang berasal dari angket/kuesioner (Ghozali, 2016). Penentuan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *Purposive Sampling*. Penelitian ini menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi sebagai variabel yang mempengaruhi, terhadap Manajemen Aset variabel yang dipengaruhi.

Variabel Independen (X) pada penelitian ini adalah Kualitas Aparatur Daerah (X1), dan Sistem Informasi (X2). Variabel Dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen Aset. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan pekerjaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada masing-masing 50 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Oku Selatan yang terdiri dari Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang keseluruhannya berjumlah 181 pegawai. Teknik penentuan Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, kriteria yang ditentukan peneliti, ialah pegawai yang terlibat secara langsung serta memiliki peran dan tanggung

jawab lebih terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah tempatnya bekerja. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna (Operator SIMDA BMD). Jumlah sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebanyak 100 pegawai, yang dapat dilihat lebih rinci pada tabel 2.

Tabel 2. Daftar sampel

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna
1.	Dinas Pendidikan	1	1
2.	Sekretariat Daerah	1	1
3.	Dinas Kesehatan	1	1
4.	BLUD RSUD Muaradua	1	1
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	1
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1
10.	Dinas Sosial	1	1
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1
12.	Dinas Ketahanan Pangan	1	1
13.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	1	1
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PP dan PA	1	1
17.	Dinas Perhubungan	1	1
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1
19.	Dinas Koperasi & UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	1
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1
21.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	1
22.	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	1	1
23.	Dinas Perikanan dan Peternakan	1	1
24.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	1
25.	Dinas Pertanian	1	1
26.	Sekretariat DPRD	1	1
27.	Kecamatan Muaradua	1	1
28.	Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	1	1
29.	Kecamatan Banding Agung	1	1
30.	Kecamatan Buay Rawan	1	1
31.	Kecamatan Buay Pemaca	1	1
32.	Kecamatan Buay Sandang Aji	1	1
33.	Kecamatan Pulau Beringin	1	1
34.	Kecamatan Muaradua Kisam	1	1
35.	Kecamatan Kisam Tinggi	1	1
36.	Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	1	1
37.	Kecamatan Buay Runjung	1	1
38.	Kecamatan Mekakau Ilir	1	1
39.	Kecamatan Simpang	1	1
40.	Kecamatan Buana Pemaca	1	1
41.	Kecamatan Tiga Dihaji	1	1
42.	Kecamatan Sindang Danau	1	1
43.	Kecamatan Sungai Are	1	1

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna
44.	Kecamatan Kisam Ilir	1	1
45.	Kecamatan Runjung Agung	1	1
46.	Inspektorat Kabupaten	1	1
47.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1	1
48.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	1
49.	Badan Pendapatan Daerah	1	1
50.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1
Jumlah		50	51
Total Sampel			100

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebanyak 100 set kuisioner yang telah disebar, ada 6 set kuisioner yang tidak dikembalikan, sehingga ada sebanyak 94 set kuisioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Kuisioner yang disebar dan telah diisi oleh responden di kuantitatifkan kemudian diinput dan dianalisis menggunakan progam SPSS. Uji kualitas data sudah dilakukan pada saat uji coba kuisioner dengan responden pengujian sebanyak 30 yang hasilnya dinyatakan valid dan reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tolak ukur yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang diukur.

Kemudian penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik, Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi berganda yang digunakan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Hasil dari uji asumsi klasik pada penelitian ini dinyatakan normalitas tidak terjadi nya multikolinieritas dan heterokastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai telah memenuhi asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil uji analisis linear berganda

Coefficients ^a	Unstandardized		Standardized		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
Model					
(Constant)	.453	.347		1.304	.195
Kualitas Aparatur Daerah	.526	.090	.503	5.853	.000
Sistem Informasi	.233	.083	.241	2.799	.006

a. Dependent Variable: Manajemen Aset

Sumber: Output SPSS diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (1)$$

$$Y = 0,453 + 0,526X_1 + 0,233X_2 + e \quad (2)$$

Keterangan:

Y = Manajemen Aset

α = Konstanta

X₁ = Kualitas Aparatur Daerah

X₂ = Sistem Informasi

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = *Error Term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,453 (positif) yang artinya jika variabel Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi bernilai 0, maka Manajemen Aset bernilai sebesar 0,453.
- Koefisien regresi Kualitas Aparatur Daerah (β_1) sebesar 0,526 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan Kualitas Aparatur Daerah sebesar satu satuan maka akan terjadi kenaikan pada variabel Manajemen Aset sebesar 0,526 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap
- Koefisien regresi Sistem Informasi (β_2) sebesar 0,233 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan Sistem Informasi sebesar satu satuan maka akan terjadi kenaikan pada variabel Manajemen Aset sebesar 0,233 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Pengujian Koefisien determinasi dalam regresi linear berganda, untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.611 ^a	.374	.360	.55986

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi, Kualitas Aparatur Daerah
b. Dependent Variable: Manajemen Aset

Sumber: Output SPSS diolah, 2022

Diketahui Nilai adjusted R2 atau koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen untuk berkontribusi terhadap variabel dependennya. Nilai adjusted R2 sebesar 0,360 menunjukkan bahwa variabel independen Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi secara bersama-sama mampu menjelaskan 36% variabel Manajemen Aset, sedangkan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar model penelitian ini.

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menentukan apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak (Reynalda, 2021). Model regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-F (simultan) dan uji-t (parsial). Hasil uji parsial (t) dapat dilihat dalam tabel 5 dan penjelasan berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	53	.347			1.304 195
Kualitas Aparatur Daerah	.526	.090	.503		5.853 .000
Sistem Informasi	.233	.083	.241		2.799 .006

a. Dependent Variable: Manajemen Aset

Sumber: Output SPSS diolah, 2022

Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (Uji t) secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- Variabel independen Kualitas Aparatur Daerah (X1)

Memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,853. Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,661 (lampiran tabel t), dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,853 > 1,661$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat diketahui bahwa H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Aparatur Daerah (X1) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Manajemen Aset (Y).

- Variabel independen Sistem Informasi (X2)

Memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,799. Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,661 (lampiran tabel t), dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,799 > 1,661$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$). Maka dapat diketahui bahwa H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi (X2) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Manajemen Aset(Y).

Hasil dari uji simultan (Uji F) pada keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 6 dan penjelasan berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Regression	17.013	2	8.507	27.139	.000 ^b	
Residual	28.523	91	.313			
Total	45.537	93				

a. Dependent Variable: Manajemen Aset
b. Predictors: (Constant), Sistem Informasi, Kualitas Aparatur Daerah

Sumber: Output SPSS diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat F_{hitung} adalah sebesar 27,139 dan signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat diketahui bahwa H_{o3} ditolak dan H_{a3} diterima, hal tersebut mengindikasikan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($27,139 > 3,10$) dengan nilai signifikansi 0,000, dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi berpengaruh terhadap variabel dependen Manajemen Aset.

Pembahasan

Berdasarkan hasil output SPSS di atas maka peneliti dapat menjelaskan dan menguraikan seberapa besar pengaruh variabel Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi terhadap variabel dependen Kualitas Manajemen Aset. Berikut penjelasan dari masing-masing variabel:

Kualitas Aparatur Daerah berpengaruh positif terhadap Manajemen Aset

Kualitas Aparatur Daerah memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Manajemen Aset. Hal ini mengartikan bahwa kualitas aparatur daerah yang baik akan memberikan peningkatan terhadap Manajemen Aset. Aparatur daerah yang berkualitas dapat di nilai dari keahlian, pelatihan, pengalaman dan keterampilan serta latar belakang pendidikan yang memadai yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu pekerjaan. Pemerintahan Kabupaten Oku Selatan ditinjau dari latar belakang pendidikan aparatur daerahnya sudah cukup memadai, hal ini di buktikan dengan melihat karakteristik responden yang ada pada kuisioner yang menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan sarjana adalah sebesar 57% dan sebesar 20% lulusan pascasarjana dari 94 responden pada penelitian ini. Hal ini tentu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas aparatur daerah.

Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap Manajemen Aset

Sistem Informasi memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Manajemen Aset. Hal ini dapat terjadi dikarenakan mungkin adanya indikasi pemerintahan Kabupaten Oku Selatan sudah melakukan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkelanjutan kepada pegawai pengelola barang, sehingga pengurus barang sudah dapat memahami dan menerapkan penggunaan SIMDA-BMD dengan baik dan semestinya. Fasilitas yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap penggunaan SIMDA-BMD merupakan poin penting dalam mewujudkan Sistem Informasi yang terintegrasi. Sehingga fungsi dari SIMDA-BMD dalam memudahkan manajemen aset mulai dari perencanaan hingga ke proses akhir pengelolaan barang milik daerah sangat dapat dirasakan manfaatnya oleh penggunanya.

Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset

Variabel independen Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Manajemen aset. Manajemen Aset dalam pelaksanaannya sangat perlu untuk ditingkatkan agar segala bentuk aset barang milik daerah dapat dikelola dengan baik dengan memperhatikan aspek efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas.

Manajemen aset juga sangat melibatkan kemampuan pemerintah daerah yang berkualitas agar dapat mempertanggung jawabkan kegiatan yang berhubungan dengan barang milik daerah dari mulai perencanaan hingga proses akhir dari barang tersebut dengan bantuan teknologi SIMDA BMD yang dalam hal ini tentu sangat mempermudah dalam proses pengkodefikasian barang inventaris dan kegiatan lainnya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan semua pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai berikut. Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Manajemen Aset di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Nilai signifikansi Kualitas Aparatur Daerah. Kemudian, Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Manajemen Aset. Peneliti selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survey melalui penyebaran kuesioner juga diperlukan melakukan wawancara lebih mendalam dan juga disarankan untuk memperluas sampel agar mendapatkan hasil yang konsisten dan disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi Manajemen aset. Pemerintah kabupaten Oku Selatan juga diharapkan agar selalu meningkatkan Manajemen Asetnya, seperti melakukan pemanfaatan pada barang milik daerah yang tidak digunakan dalam tupoksi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. (2012). Peranan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara dalam menunjang akuntabilitas pengelolaan barang milik negara (studi kasus di pusat penelitian geoteknologi lipi Bandung). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 9(3), 2. <https://doi.org/10.31113/jia.v9i3.308>
- Antoh, A. E. (2017). Pengaruh manajemen aset dalam optimalisasi aset tetap (Tanah dan bangunan) pemerintah daerah (Studi di Kabupaten Paniai). *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.55264/jumabis.v1i2.9>
- Arlini, M., & Darwanis, S. A. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi, dan kompensasi terhadap manajemen aset (Studi pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4).
- Azhar, I. (2017). Pengaruh sistem informasi terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 150–160. <https://doi.org/10.33059/jensi.v1i2.408>
- Azhar, I., & Darwanis, S. A. (2013). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302, 164. <https://doi.org/10.33059/jensi.v1i1.398>
- Dewi, S., Jannah, L. M., & Jumaryadi, Y. (2018). Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen aset tetap pada pt. metis teknologi corporindo. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(1), 81–91. <https://doi.org/10.24853/justit.9.1.81-91>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjono Padmono Putro. (2022). Harmonization of communication channels: The impact of IT governance on organizational interactions. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 1(02), 75–81. <https://doi.org/10.58471/esaprom.v1i02.3539>
- Jefry, J. E. P., Azhar, I., & Zati, M. R. (2021). Pengaruh pemahaman regulasi, sistem informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap manajemen aset pada skpk kota langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(6), 350–361. <https://doi.org/10.33059/jmas.v2i6.4625>

-
- Kariem, M. Q. (2020). Konsepsi kebijakan pemerintah di era new normal. *TheJournalish: Social and Government*, 1(2), 76–80.
- Kurniyanta, A., Roziq, A., & Sularso, R. A. (2018). Analisis pengaruh manajemen aset, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pendapatan dengan optimalisasi aset idle sebagai variabel intervening. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 131–144. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7610>
- Mainar, D., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset (studi pada SKPK di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(1).
- Prihatini, T., Askandar, N. S., & Anwar, S. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi, kompensasi, dan asas–asas good corporate governance terhadap manajemen aset pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(02).
- Reynalda, M. D. M. (2021). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif*. Media Sains Indonesia.
- Rosihan, R., Bharanti, B. E., & Ratang, W. (2017). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, sistem informasi dan komitmen terhadap manajemen aset. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Yuliana, R. E., Taufik, T., & Nasrizal, N. (2021). Pengaruh kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi manajemen, sistem pengendalian intern terhadap efektivitas manajemen aset tetap di pemerintah kabupaten bengkalis dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 215–225.
- Yusnidar, Y., Khadafi, M., & Damanhu, D. (2021). Faktor–faktor yang mempengaruhi manajemen asset pada pemerintah kota lhokseumawe. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 117–128. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3430>